



## Strategi Efektifitas Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Program Pengembangan Pemuda dan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat

Jafar Patty<sup>1\*</sup>, Mohamad Arsad Rahawarin<sup>1</sup>, Hendry Selanno<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

\*Corresponding author email: [jafarpatty@gmail.com](mailto:jafarpatty@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received August 10, 2025  
Approved October 15, 2025

#### Keywords:

*Performance-Based Budgeting,  
Pentahelix, AHP*

#### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of performance-based budgeting in the Youth and Sports Office of West Seram Regency to support youth development programs and improve sports achievements. A quantitative approach was employed using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to determine priority strategies for budget management. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving 15 respondents from five pentahelix elements: government, academics, community, media, and development planning sectors. The findings reveal strong internal factors, such as organizational commitment, experienced human resources, and productive partnerships, which support the implementation of performance-based budgeting. Externally, government support, CSR opportunities, and technological advancements provide a favorable environment for aggressive budget optimization strategies. However, challenges such as limited HR capacity, dependence on regional budgets, and disaster risks must be addressed. The study recommends strengthening HR capacity through technical training and digital literacy, leveraging technology for transparent financial management, and diversifying funding sources via private partnerships and international grants. These strategies are expected to enhance the effectiveness, transparency, and accountability of regional financial management while delivering tangible impacts on youth development and sports performance.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penganggaran berbasis kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendukung program pengembangan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengidentifikasi prioritas strategi pengelolaan anggaran. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan 15 responden dari lima elemen pentahelix: pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor perencanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas memiliki kekuatan internal, seperti komitmen organisasi yang kuat, SDM berpengalaman, serta kemitraan produktif, yang mendukung penerapan penganggaran berbasis kinerja. Di sisi eksternal, dukungan pemerintah, peluang CSR, dan kemajuan teknologi membuka ruang strategi agresif untuk pengelolaan anggaran yang lebih efektif. Namun, keterbatasan kapasitas SDM, ketergantungan pada APBD, dan risiko bencana menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan literasi digital, pemanfaatan teknologi

untuk transparansi pengelolaan anggaran, serta diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan hibah internasional. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pengembangan pemuda dan prestasi olahraga.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Patty, J., Rahawarin, M. A., & Selanno, H. (2025). Strategi Efektifitas Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Program Pengembangan Pemuda dan Olahraga Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2816–2825. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4564>

## PENDAHULUAN

Penganggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting) merupakan pendekatan modern yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran. Dalam sistem ini, alokasi dana tidak hanya mengikuti pola kebutuhan rutin atau kebiasaan sebelumnya, tetapi lebih menekankan pada hasil yang diharapkan dan capaian kinerja yang terukur (Syihabudin et al., 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak positif terhadap tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi potensi pemborosan anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan menjadi lebih fokus pada hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat (PARDEDE et al., 2023).

Penerapan penganggaran berbasis kinerja juga mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah maupun organisasi. Dengan mengaitkan anggaran pada target dan indikator kinerja yang jelas, publik dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi penggunaan dana (Rizqiyanto & Al Rahman, 2024). Transparansi ini menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi, karena setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dituntut mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Tanur et al., 2022).

Keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja juga membantu proses evaluasi efektivitas program. Jika terdapat program atau kegiatan yang tidak mencapai hasil sesuai rencana, evaluasi ini memberikan dasar untuk melakukan perbaikan (Situmorang & Martani, 2023). Anggaran dapat dialihkan ke program lain yang lebih prioritas atau memiliki dampak yang lebih besar. Dengan demikian, proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Lukito et al., 2024).

Selain meningkatkan akuntabilitas, sistem penganggaran berbasis kinerja memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan dalam perencanaan anggaran tidak lagi didasarkan pada perkiraan atau asumsi semata, melainkan pada data kinerja yang valid dan terukur (Safitri, 2022). Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program yang telah berjalan, sehingga mempermudah pemerintah dalam menentukan prioritas program yang harus didukung. Proses ini juga membantu meminimalkan pengeluaran untuk kegiatan yang tidak produktif (Syihabudin et al., 2023).

Penganggaran berbasis kinerja juga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menghubungkan alokasi dana dengan capaian kinerja, instansi pemerintah memiliki dorongan yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat (Hiola & Mahmud, 2024). Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Hal ini pada akhirnya dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak luas (Fitranata & Primastuti, 2025).

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dinas ini bertugas merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan

partisipasi pemuda, serta mendorong prestasi atlet lokal di berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat daerah maupun nasional (Ummam et al., 2023).

Fungsi utama dinas ini mencakup penyusunan program yang dapat mengembangkan keterampilan pemuda dan mendorong minat mereka dalam kegiatan positif. Selain itu, dinas juga mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi atlet (Fathony et al., 2023). Pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan juga menjadi fokus, termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas, guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kemajuan pemuda dan olahraga (Sakir & Arni, 2023). Namun, dalam praktiknya, pengembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran. Banyak program inovatif yang telah direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Program-program tersebut meliputi pelatihan keterampilan, turnamen olahraga, hingga pembangunan dan perbaikan fasilitas olahraga yang sangat dibutuhkan masyarakat (Maelani & Indarsari, 2024).

Keterlambatan atau bahkan kegagalan realisasi anggaran menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan program. Setiap tahun, dana yang dialokasikan untuk sektor pemuda dan olahraga sering kali tidak mencukupi atau pencairannya terlambat. Kondisi ini membuat berbagai kegiatan yang seharusnya dilaksanakan untuk mendukung pengembangan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan. Dampaknya, tujuan strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai secara optimal (Wangi & Sarumpaet, 2023).

Ketidakmampuan melaksanakan program ini membawa dampak langsung pada pemuda di daerah tersebut. Banyak pemuda kehilangan kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan, pembinaan kepemimpinan, atau kegiatan positif lainnya. Di sisi lain, minimnya dukungan terhadap sektor olahraga menyebabkan fasilitas yang tersedia kurang memadai dan jarang ada kompetisi yang dapat meningkatkan motivasi serta prestasi atlet lokal. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki pemuda dan atlet daerah sulit berkembang maksimal.

Permasalahan ini juga mencerminkan kurangnya prioritas yang diberikan pada sektor pemuda dan olahraga dalam perencanaan anggaran daerah. Padahal, investasi pada pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Tanpa dukungan yang memadai, partisipasi pemuda dalam kegiatan positif dapat menurun, sementara tantangan sosial, seperti kenakalan remaja atau kurangnya produktivitas, dapat meningkat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan optimalisasi perencanaan dan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis data yang akurat, sehingga alokasi dana dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus terus ditingkatkan, agar penggunaan dana dapat dipantau oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Alternatif pendanaan juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi atas keterbatasan anggaran. Misalnya, menjalin kerja sama dengan sektor swasta, lembaga donor, atau memanfaatkan program bantuan dari pemerintah pusat. Pendekatan kolaboratif ini dapat membuka peluang pendanaan tambahan yang memungkinkan pelaksanaan program-program strategis untuk pengembangan pemuda dan olahraga.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan sistem ini, setiap program yang diajukan akan dievaluasi berdasarkan manfaat nyata yang dapat diberikan. Hal ini membantu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan pemuda dan peningkatan prestasi atlet daerah.

Penganggaran berbasis kinerja juga memungkinkan evaluasi penggunaan dana yang lebih objektif dan transparan. Setiap rupiah yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko ketidakterlaksanaan program akibat perencanaan yang kurang tepat. Evaluasi berkala juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi program, sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan pendekatan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Program-program yang terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat dapat diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang produktif dapat diminimalkan atau dialihkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan sektor pemuda dan olahraga di daerah tersebut. Penerapan penganggaran berbasis kinerja merupakan solusi jangka panjang yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengaitkan anggaran pada kinerja yang terukur, pemerintah daerah dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Langkah ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pengembangan pemuda yang lebih berkualitas dan prestasi olahraga yang membanggakan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang jelas, terukur, dan mendalam mengenai strategi efektivitas penganggaran berbasis kinerja dalam program pengembangan pemuda dan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (Saleh & Andriana, 2021). Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dapat dianalisis secara objektif sehingga hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan, mulai April hingga Juni 2025, di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai lokasi utama penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terkait langsung dengan proses penganggaran dan pengelolaan program pengembangan pemuda dan olahraga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, catatan anggaran, dan referensi lain yang relevan. Kata-kata dan tindakan informan yang diamati menjadi sumber utama yang kemudian didukung oleh dokumen sebagai data tambahan, sehingga informasi yang dikumpulkan lebih komprehensif.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis strategi efektivitas penganggaran berbasis kinerja dalam mendukung program pengembangan pemuda dan olahraga. Fokus ini penting karena strategi yang tepat dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memaksimalkan pencapaian program, serta mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, pendekatan yang mendalam dilakukan untuk memahami hubungan antara alokasi anggaran dan hasil yang dicapai di lapangan.

Responden penelitian dipilih berdasarkan pendekatan model pentahelix, yang melibatkan lima elemen utama: pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor perencanaan pembangunan. Dalam penelitian ini, responden terdiri dari akademisi bidang administrasi publik sebanyak lima orang, komunitas perencanaan pembangunan sebanyak empat orang, perwakilan pemerintah dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak dua orang serta Bappeda sebanyak dua orang, dan dua orang dari media informasi. Pemilihan responden ini dilakukan agar perspektif yang diperoleh lebih beragam dan menyeluruh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam dari informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai penganggaran berbasis kinerja. Observasi dilakukan di lapangan untuk melihat secara langsung proses perencanaan dan pelaksanaan program. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung seperti catatan, laporan, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP digunakan untuk mengurutkan prioritas strategi berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. Proses ini melibatkan pembuatan struktur masalah ke dalam hierarki, penilaian menggunakan skala perbandingan berpasangan, dan analisis konsistensi jawaban responden. Jika nilai rasio inkonsistensi lebih besar dari 0,1, dilakukan klarifikasi ulang; sedangkan jika inkonsistensinya terlalu besar, data responden tersebut tidak

digunakan. Pendekatan ini membantu menghasilkan analisis yang rasional, objektif, dan dapat dijadikan dasar rekomendasi strategi penganggaran.

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, diberikan definisi operasional beberapa konsep utama. Penganggaran berbasis kinerja diartikan sebagai sistem alokasi dana yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja yang terukur. Pendekatan pentahelix adalah integrasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan industri untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Analisis Hirarki Proses (AHP) dipahami sebagai metode pengambilan keputusan multi-kriteria untuk menentukan prioritas. Sementara itu, strategi peningkatan efektivitas penganggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki peran strategis dalam mengembangkan potensi pemuda dan olahraga, namun berbagai keterbatasan, terutama terkait alokasi anggaran, sering kali menghambat optimalisasi program. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terukur mengenai efektivitas strategi penganggaran berbasis kinerja. Dengan melibatkan berbagai elemen pentahelix—pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor perencanaan—penelitian ini bertujuan menyusun prioritas strategi yang rasional, objektif, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana penganggaran berbasis kinerja dapat dioptimalkan untuk mendukung program pengembangan pemuda dan olahraga. Temuan-temuan yang diperoleh juga diharapkan menjadi masukan penting bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di sektor ini.

### Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat dalam upaya meningkatkan efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Analisis ini menjadi dasar penting dalam memahami posisi internal dinas, sehingga strategi yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta pemanfaatan anggaran yang optimal.

Dari sisi kekuatan, terdapat beberapa faktor yang mendukung efektivitas penganggaran berbasis kinerja. Pertama, adanya komitmen kuat dalam pengembangan pemuda dan olahraga yang tercermin pada arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi anggaran yang konsisten. Kedua, struktur organisasi yang tertata dengan baik memungkinkan alur kerja yang jelas, distribusi tanggung jawab yang efektif, serta koordinasi yang lebih optimal. Ketiga, penerapan indikator kinerja yang spesifik dan terukur memberikan dasar objektif dalam menilai capaian program dan penggunaan anggaran. Keempat, keberadaan sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang kepemudaan dan keolahragaan mendukung penyusunan program yang strategis dan efisien. Kelima, kemitraan yang produktif dengan pihak eksternal, seperti organisasi kepemudaan, institusi pendidikan, dan klub olahraga, memperluas jangkauan program serta menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.

Namun, terdapat sejumlah kelemahan yang menjadi tantangan dalam implementasi penganggaran berbasis kinerja. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami konsep dan praktik anggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan dan evaluasi belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Selain itu, kurangnya sistem pengumpulan data dan evaluasi kinerja menghambat pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat. Struktur anggaran yang kaku dan birokratis juga mengurangi fleksibilitas dinas dalam menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan lapangan yang dinamis.

Ketergantungan pada anggaran daerah menjadi tantangan lain yang signifikan. Sebagian besar program pengembangan pemuda dan olahraga masih bergantung pada dana APBD tanpa adanya diversifikasi sumber pendanaan, seperti hibah, CSR, atau kerja sama dengan pihak swasta. Ketergantungan ini membuat pelaksanaan program sangat terpengaruh oleh kondisi fiskal daerah, membatasi ruang inovasi, dan mengurangi ketahanan pembiayaan untuk keberlanjutan program jangka panjang.

Selain itu, tantangan transparansi dan akuntabilitas internal juga perlu mendapat perhatian. Minimnya mekanisme kontrol internal serta keterlibatan staf dalam proses pengawasan membuat potensi ketidaktepatan penggunaan anggaran sulit terdeteksi lebih awal. Kondisi ini tidak hanya menghambat upaya penerapan penganggaran berbasis hasil, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap dinas. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengawasan internal dan peningkatan keterbukaan informasi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

### **Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi efektivitas penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat. Pemahaman terhadap faktor-faktor eksternal ini sangat penting agar strategi yang disusun dapat memanfaatkan peluang yang ada sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin menghambat keberhasilan program.

Dari sisi peluang, dukungan pemerintah pusat dan daerah menjadi modal strategis yang memungkinkan penerapan penganggaran berbasis kinerja lebih optimal. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memperluas sumber pembiayaan program kepemudaan dan olahraga. Perkembangan teknologi informasi juga menjadi peluang besar untuk mempercepat proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi anggaran secara transparan dan akurat. Ditambah lagi, keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi kepemudaan memperkuat partisipasi publik, menjadikan program lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan.

Peluang lain datang dari akses terhadap hibah internasional dan pelatihan kapasitas SDM. Dinas memiliki kesempatan menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang fokus pada pengembangan pemuda dan olahraga, baik melalui pendanaan, transfer teknologi, maupun penguatan sistem tata kelola. Di sisi lain, berbagai program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan organisasi non-pemerintah memberikan ruang bagi peningkatan kompetensi aparatur dinas, terutama dalam pengelolaan keuangan berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi. Regulasi nasional yang mendorong reformasi keuangan daerah juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi penganggaran.

Namun, terdapat beberapa ancaman yang perlu diantisipasi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama, karena keterbatasan dana menghambat optimalisasi program yang direncanakan. Perubahan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, berisiko mengganggu kesinambungan program dan menurunkan efisiensi penggunaan anggaran. Rendahnya pemahaman dan partisipasi pemangku kepentingan juga berpotensi melemahkan implementasi penganggaran berbasis kinerja, sementara risiko penyalahgunaan anggaran dapat mengganggu kepercayaan publik dan menghambat pencapaian tujuan program.

Selain itu, faktor bencana alam dan krisis menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan. Kondisi geografis Kabupaten Seram Bagian Barat yang rawan bencana seperti banjir, gempa, atau cuaca ekstrem dapat mengganggu pelaksanaan program dan memaksa pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan darurat. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menghambat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program meskipun menghadapi dinamika eksternal.

Melalui identifikasi peluang dan ancaman ini, Dinas Pemuda dan Olahraga dapat merancang strategi penganggaran berbasis kinerja yang adaptif dan berkelanjutan. Pemanfaatan peluang harus diiringi dengan penguatan tata kelola, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitigasi

risiko ancaman perlu dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan, penguatan pengawasan internal, dan mekanisme respons cepat terhadap kondisi darurat agar efektivitas penggunaan anggaran tetap terjaga.

#### Analisis Bobot, Rating, dan Skor Faktor Internal dan Eksternal

Analisis SWOT ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi strategi peningkatan efektivitas penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat. Proses analisis dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Merumuskan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).
2. Memberikan bobot tiap faktor (skala 1,0 = sangat tidak penting sampai 4,0 = sangat penting).
3. Memberikan rating tiap faktor (skala 1–4 positif untuk kekuatan/peluang, dan 1–4 negatif untuk kelemahan/ancaman).
4. Menghitung skor dengan mengalikan bobot dan rating.

**Tabel 1. Faktor Internal**

No	Pernyataan	Bobot	Rating	Skor
<b>Kekuatan</b>				
1	Komitmen dalam Pengembangan Pemuda dan Olahraga	0,21	3,72	0,78
2	Struktur Organisasi yang Jelas	0,18	3,36	0,6
3	Indikator Kinerja yang Terukur	0,2	3,36	0,67
4	SDM yang Berpengalaman	0,19	3,82	0,72
5	Kemitraan dengan Pihak Eksternal	0,19	3,9	0,74
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>3,51</b>
<b>Kelemahan</b>				
1	Kapasitas SDM Terbatas	0,17	-2,72	-0,46
2	Keterbatasan Data dan Evaluasi	0,19	-2,72	-0,51
3	Kurangnya Fleksibilitas Anggaran	0,21	-3	-0,63
4	Ketergantungan pada Anggaran Daerah	0,23	-3,45	-0,79
5	Kurangnya Transparansi Internal	0,18	-2	-0,36
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>-2,75</b>

**Tabel 2. Faktor Eksternal**

No	Pernyataan	Bobot	Rating	Skor
<b>Peluang</b>				
1	Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah	0,16	3	0,48
2	Kemitraan Swasta dan CSR	0,14	3,45	0,48
3	Perkembangan Teknologi Anggaran	0,12	3,45	0,41
4	Dukungan Masyarakat dan Organisasi Pemuda	0,12	4	0,48
5	Hibah dan Bantuan Lembaga Internasional	0,14	3,27	0,45
6	Penguatan Regulasi Nasional	0,14	3,45	0,48

7	Program Pelatihan dan Pengembangan SDM	0,14	3,36	0,42
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>3,26</b>
<b>Ancaman</b>				
1	Keterbatasan Anggaran Daerah	0,18	-2,54	-0,45
2	Perubahan Kebijakan	0,2	-2,72	-0,54
3	Rendahnya Partisipasi Stakeholder	0,18	-3	-0,54
4	Potensi Penyalahgunaan Anggaran	0,24	-2,18	-0,52
5	Krisis atau Bencana Alam	0,18	-2,45	-0,52
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>		<b>-2,51</b>

Dengan hasil skor positif pada faktor internal (1,252) dan faktor eksternal (1,04), posisi Dinas Pemuda dan Olahraga berada pada kuadran yang menunjukkan strategi agresif. Artinya, dinas memiliki kekuatan internal yang cukup baik dan peluang eksternal yang besar, sehingga strategi yang dikembangkan sebaiknya fokus pada memaksimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

### Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen organisasi, struktur yang jelas, dan penerapan indikator kinerja terukur menjadi modal utama dalam mengarahkan anggaran ke program-program yang berdampak nyata. Pendekatan ini selaras dengan tujuan reformasi keuangan daerah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil. Namun, untuk memastikan implementasi berjalan optimal, diperlukan penguatan kapasitas internal agar penganggaran berbasis kinerja dapat menjadi budaya kerja yang berkelanjutan (Rahmi, 2022).

Analisis faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan dinas memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan kelemahannya. Hal ini menandakan bahwa potensi internal sudah cukup solid untuk mendukung strategi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Kemitraan dengan pihak eksternal, pengalaman SDM, dan komitmen pimpinan menjadi faktor penggerak yang perlu terus dipertahankan dan diperkuat. Namun, kelemahan seperti keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya fleksibilitas penggunaan anggaran harus segera diatasi, misalnya melalui pelatihan teknis dan reformasi prosedural agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih adaptif.

Pada analisis eksternal, peluang yang dimiliki dinas teridentifikasi cukup besar, terutama melalui dukungan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan akses pada sumber pembiayaan alternatif seperti CSR dan hibah internasional. Kemajuan teknologi juga membuka ruang inovasi dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Meski demikian, ancaman seperti keterbatasan fiskal, perubahan kebijakan, dan risiko bencana menuntut dinas memiliki strategi mitigasi yang jelas. Diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan sistem manajemen risiko menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Hasil analisis SWOT dengan skor positif pada faktor internal (1,252) dan eksternal (1,04) menempatkan dinas pada kuadran strategi agresif. Posisi ini menandakan bahwa dinas memiliki kapasitas internal yang kuat untuk memanfaatkan peluang eksternal yang tersedia. Oleh karena itu, strategi pengelolaan anggaran ke depan harus difokuskan pada penguatan program inovatif yang berorientasi pada hasil serta pengembangan kolaborasi lintas sektor. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta dapat menjadi pengungkit utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.

Selain penguatan kolaborasi, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen anggaran menjadi kebutuhan mendesak. Sistem digital yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelaporan, serta memudahkan evaluasi berbasis data. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi perencanaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Investasi pada teknologi dan peningkatan literasi digital SDM harus menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran jelas bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki fondasi yang kuat untuk mengoptimalkan penganggaran berbasis kinerja. Namun, penguatan kapasitas SDM, diversifikasi sumber pembiayaan, dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan anggaran tidak hanya menjadi lebih efektif dan efisien, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan pemuda dan olahraga di Kabupaten Seram Bagian Barat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan kekuatan internal yang solid, seperti komitmen organisasi, pengalaman SDM, dan kemitraan yang produktif, serta peluang eksternal berupa dukungan pemerintah, CSR, dan kemajuan teknologi, dinas berada pada posisi strategis untuk mengembangkan strategi agresif. Namun, kelemahan internal seperti keterbatasan kapasitas SDM, ketergantungan pada APBD, dan kurangnya fleksibilitas anggaran, serta ancaman eksternal seperti ketidakpastian fiskal dan risiko bencana, tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi secara komprehensif.

Untuk mengoptimalkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, dinas perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan literasi digital, serta memperkuat sistem informasi manajemen keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk kerja sama dengan sektor swasta, hibah internasional, dan pemanfaatan program CSR, menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada APBD. Selain itu, penguatan kolaborasi pentahelix dan penerapan mekanisme manajemen risiko yang adaptif diperlukan agar program tetap berkelanjutan meskipun menghadapi dinamika eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fathony, A. A., Priatna, H., & Susanti, I. (2023). PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH PADA PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 14(03), 132–141.
- Fitranata, R., & Primastuti, A. (2025). *PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR*. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
- Hiola, Y., & Mahmud, A. D. (2024). Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 498–504.
- Lukito, D., Qadaar, A., Mardikawati, B., & Susanti, M. (2024). PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAH. *ECOBISMA (JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN)*, 11(1), 1–11.
- Maelani, N., & Indarsari, A. (2024). Efektivitas implementasi anggaran desa berdasarkan pendekatan akuntansi kinerja di Desa Cariu. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).
- PARDEDE, R., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2023). Faktor-faktor Keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 1(2), 242–252.

- Rahmi, R. (2022). Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Pbk) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Rka-K/L). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6978–6989.
- Rizqiyanto, N., & Al Rahman, A. (2024). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kenaikan Tunjangan Kinerja Bawaslu Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(2), 1086–1097.
- Safitri, F. (2022). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12).
- Sakir, A. R., & Arni, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility PT Pelindo IV (Persero) pada Alokasi Bantuan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(2), 123–133.
- Saleh, R., & Andriana, N. (2021). Efektivitas dan efisiensi belanja berdasarkan anggaran berbasis kinerja pada KPP Pratama Bulukumba. *Info Artha*, 5(2), 130–139.
- Situmorang, G. M., & Martani, D. (2023). Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 2941–2948.
- Syihabudin, T., Ma'mur, I., & Shobri, S. (2023). Analisis Strategi Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Di Kementerian Agama Kabupaten Serang. *SOSIO DIALEKTIKA*, 8(1), 25–41.
- Tanur, D., Rahim, S., & Su'un, M. (2022). Implikasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Serta Anggaran Berbasis Kinerja Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(1), 75–92.
- Ummam, A., Qodarina, N., Siregar, P. I. R., & Firmansyah, A. (2023). Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik: Suatu Tinjauan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 63–71.
- Wangi, G. S., & Sarumpaet, T. L. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Pada Pemerintah Daerah Bandung. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, 3(1), 460–473.